

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Mengenai kerja sama dalam lingkup ASEAN, Cetak Biru Komunitas Politik Keamanan ASEAN mengamanatkan untuk diadakannya kerja sama maritim ASEAN (*ASEAN Maritime Cooperation*). Kerja Sama ini mencakup rencana aksi untuk mendorong kerja sama dalam melawan pembajakan di laut, perampokan bersenjata terhadap kapal, penyelundupan dan pembajakan di udara. Termasuk di dalam usaha untuk mendorong Kerja Sama Maritim ASEAN (*ASEAN Maritime Cooperation*) adalah rencana pembentukan Forum Maritim ASEAN. Forum ini masih dalam masa pendirian, dimana masih dilakukan berbagai *workshop* terkait pembentukannya. Forum Maritim ASEAN ini nantinya akan menjadi forum untuk bertukar ide tidak hanya mengenai isu-isu keamanan maritim, tetapi juga terkait hal-hal lain seperti perlindungan lingkungan laut, *illegal fishing*, penyelundupan dan transportasi maritim.
2. Kerja sama yang dilakukan negara-negara ASEAN, baik secara trilateral maupun multilateral, menunjukkan rencana-rencana ASEAN yang sejalan dengan berbagai kerja sama atas Selat Malaka yang telah dilakukan sebelum pembentukan Komunitas ASEAN. Dengan dibentuknya Komunitas ASEAN bukan berarti negara-negara anggota ASEAN berada di bawah kekuatan yang superior. Mereka tetap diberikan kebebasan untuk mengadakan berbagai kerja sama terkait hal-hal yang masuk kedalam yurisdiksi teritorial masing-masing negara, tetapi harus tetap berada di dalam kerangka kerja ASEAN yang telah disepakati. Dalam pengamanan Selat Malaka dapat terlihat peran ASEAN yang tidak secara langsung, namun tetap memberikan dorongan-dorongan terhadap pengamanan Selat Malaka melalui pencantuman akan hal ini di setiap instrumen-instrumen hukumnya. Dengan begitu, Negara-Negara tepi Selat terus diingatkan dan

terus didorong untuk melakukan berbagai upaya untuk mengamankan jalur pelayaran di Selat Malaka, dengan operasional kerja sama pengamanannya tetap diserahkan kepada Negara-Negara Pantai.

5.2 Saran

Bedasarkan pembahasan yang dilakukan, terdapat hal yang disarankan untuk dilakukan ASEAN dalam mengamankan Selat Malaka dari masalah pembajakan kapal dan perampokan bersenjata antara lain:

1. Keamanan Selat Malaka akan sangat ditentukan oleh sejauh mana kontribusi aktif negara-negara pantai dan masyarakat internasional memberi efek terhadap keamanan selat itu sendiri. Selain melakukan penanganan di dalam negeri, upaya-upaya internasional dalam rangka melawan aksi kejahatan di laut juga perlu dikembangkan. Upaya-upaya tersebut dapat dilaksanakan dalam dua perspektif yaitu dalam kerangka hukum/konvensi internasional dan dalam rangka kerjasama internasional. Dalam penanganannya, terutama dalam melawan aksi kejahatan di Selat Malaka, implementasi dari kedua perspektif tersebut memerlukan suatu inisiatif politik dari negara-negara pantai. Inisiatif politik ini sangat diperlukan untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum internasional, baik yang telah ada maupun yang akan dibentuk. Sementara itu, respon hukum dari semua pihak juga sangat diharapkan untuk mengikat komitmen-komitmen politik dari negara-negara tersebut pada tahap implementasi. Kerjasama internasional dalam hal ini dapat dilakukan antar negara, badan/organisasi internasional, dan perusahaan privat yang terkait.
2. Penyelesaian isu keamanan di Selat Malaka dapat dicapai dengan memperkuat kerjasama antara negara-negara pantai, dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kerangka kerjasama keamanan

yang lebih terkordinasi pada satu sisi dengan perbaikan dan bantuan penguatan kapasitas antara negara pantai dengan negara pengguna. Sejauh ini, sekuritisasi baru terbatas dalam bidang-bidang kerja sama pemberantasan, dan kurang dalam program-program pencegahan. Masyarakat umum belum banyak dilibatkan misalnya melalui program-program pendidikan, sosial dan budaya pada level kawasan.

3. Untuk mengatasi masalah pembajakan, kerja sama kawasan baik bilateral maupun multilateral perlu ditingkatkan. Sejauh ini telah dilaksanakan berbagai pertemuan antar para pemimpin negara yang melahirkan berbagai kebijakan dan produk-produk hukum, namun masih lemah dalam implementasi. Belum efektifnya kerja sama antara lain disebabkan masalah sensitivitas kedaulatan, kebijakan serta kondisi negara yang berbeda. Bahkan dalam kasus di Indonesia, masih terjadi kelemahan koordinasi antara lembaga-lembaga yang berwenang seperti kementerian Luar Negeri, TNI dan BIN. Contohnya, terkait patroli bersama di wilayah perairan yang disepakati antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia, yang sampai saat ini ketiga pihak masih membahas Prosedur Standar Operational (PSO).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Clark G Reynolds. *Command of the Sea: The History and Strategy of Maritime Empires*, Morrow, 1974

Cleary & Chuan. *Environment and Development in the Straits of Malacca*. Routledge, 2000.

Hasjim Djalal. *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*. (Cet. 1). Bandung: Binacipta, 1979.

I Wayan Parthiana. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, 2014

Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2003

Mokhzani Zubir. *The Strategic Value of the Straits of Malacca*. 1-19: Maritime Institute of Malaysia (MIMA), 2006.

Peter Malanczuk. *ed, Akehurst's Modern Introduction to International Law*, ed. 7. New York: Routledge, 1997

Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta; Ghalia Indonesia, 1983.

Solvay Gerke & Hans-Dieter Evers. *Melaka Straits: A Narrow Band for World Trade*. *Akademika* 81(1), 2011

Vivian Forbes. *Conflict and Cooperation in Managing Maritime Space in Semi-enclosed Seas*. Singapore University Press, 2001.

JURNAL

Kevin X Li dan Jin Cheng. "Maritime Law and Policy For Energy Security in Asia: A Chinese Perspective", *Journal of Maritime Law and Commerce*. Oktober. 2006. Hlm. 1-18.

Kresno Buntoro. "Antara Piracy dan Armed Robbery At Sea (Tinjauan Singkat Keamanan di Selat Malaka)", *Lex Jurnalica Vol.3 No.2 April 2006*

Lucas Bento, "Toward an International Law of *Piracy Sui Generis*: How the Dual Nature of Maritime *Piracy* Law Enables *Piracy* to Flourish", *Berkeley Journal of International Law*, (UC Berkeley, 2011)

M Saeri. "Karakteristik dan Permasalahan Selat Malaka" *Riau; Jurnal Transnasional*, Vol. 4, No. 2, 2013

Milena Sterio. "The Somali Piracy Problem: A Global Puzzle Necessitating a Global Solution", *American University Law Review*, (June, 2010)

Sabella Ardimasari Aldebaran. "Upaya Littoral States (Indonesia, Malaysia dan Singapura) Dengan User States Dalam Memberantas Kejahatan Armed Robbery (Perompakan Bersenjata) di Selat Malaka Tahun 2008-2013" *Journal of International Relations*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2016

Solvay Gerke & Hans-Dieter Evers. "Perkembangan Wilayah Selat Malaka", *Working Paper Series*.No.112/09, CenPRIS

Tammy M Sittnick. "State Responsibility and Maritime Terrorism in the Strait of Malacca: Persuading Indonesia and Malaysia to Take Additional Steps to Secure the Strait", *Pacific Rim Law & Policy Journal Vol. 14 No. 3*, 2005

Yudistira Panduwinata. "Pengawasan Wilayah Laut Selat Malaka Pada Kerjasama Malacca Strait Sea Patrols Tahun 2011 – 2013: Perspektif Indonesia" *Journal of International Relations*, Volume 2, Nomor 4, 2016

INTERNET

About ReCAAP, http://www.recaap.org/about_ReCAAP-ISC

About the ASEAN Regional Forum,
<http://aseanregionalforum.asean.org/about.htm>,

ASEAN Political - Security Community. "ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM)" <https://asean.org/asean-political-security-community/asean-defence-ministers-meeting-admm/>

Bakrie & Connie Rahakundini. "Maritime Security and Safety di Selat Malaka", http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=12180&coid=4&caid=33&gid=3

Candra Novitasari. "Pengertian Demografi", <https://pelajarindo.com/pengertian-demografi/>

CNBC's Ted Kemp & CNBC's Laura Trythall. "Crime on the Highseas: The World's Pirated Waters", <https://www.cnbc.com/2014/09/15/worlds-most-pirated-waters.html>

Darma Agung S.I. "Menghadapi Singapura di Masa Depan", <https://defensia.files.wordpress.com/2007/04/menghadapi-singapura-di-masa-depan.pdf>

Dudung. "Pengertian Geostrategi Indonesia Secara Akurat", <https://www.dosenpendidikan.com/pengertian-geostrategi-indonesia-secara-akurat/>

Edy Burmansyah Indoprogres. "Internasionalisasi Selat Malaka", <https://indoprogres.com/2016/06/internasionalisasi-selat-malaka/>

Hasjim Djalal. "Persoalan Selat Malaka dan Singapura" <https://anzdoc.com/persoalan-selat-malaka-a-a-a-singapura.html>

Ian Storey. "China's Malacca Dilemma", China Brief 6, Issue 3, 12 April 2006. <https://jamestown.org/program/chinas-malacca-dilemma/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan) <https://kbbi.web.id/ekologi>

Kementerian Luar Negeri. “*ASEAN Connectivity*” <https://www.kemlu.go.id/ptri-asean/id/Pages/ASEAN-Connectivity.aspx>

Kementerian Luar Negeri. “*Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Teroganisir*”, <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Teroganisir.aspx>

Ministry of Defence Singapore. “*Fact Sheet: The Malacca Straits Patrol*”, <https://www.mindef.gov.sg/web/portal/mindef/news-and-events/latest-releases/article-detail/2016/april/2016apr21-news-releases-00134/>

Ministry of Defence Singapore. “*Launch of Eyes in the Sky Initiative*”, http://www.nas.gov.sg/archivesonline/data/pdfdoc/MINDEF_20050913001.pdf

Nazery Khalid. “*Burden Sharing, Security and Equity in the Straits of Malacca*”, <https://apjff.org/-Nazery-Khalid/2277/article.html>

Pemuda Maritim. “*Ancaman ketahanan maritim di selat malaka*” <http://www.pemudamaritim.com/2014/03/ancaman-ketahanan-maritim-di-selat.html>

PORTONEWS. “*Kecelakaan Kapal di Selat Malaka yang Menimbulkan Tumpahan Minyak*”, <https://www.portonews.com/2017/oil-and-chemical-spill/kecelakaan-kapal-di-selat-malaka-yang-menimbulkan-tumpahan-minyak/>

ReCAAP. “*Factsheet on the Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia (ReCAAP)*”, <http://www.nas.gov.sg/archivesonline/data/pdfdoc/20061129970.pdf>

Rodion Ebbighausen. “*Southeast Asia- a Pirates paradise*”, <https://www.dw.com/en/southeast-asia-a-pirates-paradise/a-18599742>

Sumberpengertian.co. “*Pengertian Geopolitik Secara Umum dan Menurut Para Ahli*”, <http://www.sumberpengertian.co/pengertian-geopolitik-dan-menurut-para-ahli>

Vijay Sakhujia. “*The Indian Navy’s Agenda for Maritime Security in the Indian Ocean*”, <https://jamestown.org/program/the-indian-navys-agenda-for-maritime-security-in-the-indian-ocean/>

Zakky. “Pengertian Geografi Menurut Para Ahli Beserta Definisi & Konsepnya“, <https://www.zonareferensi.com/pengertian-geografi/>

INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL

Agreement on Information Exchange and Establishment of Communication Procedures, Article II “Areas of Cooperation”.

ASEAN, ASEAN Political-Security Community Blueprint

ASEAN Charter

ASEAN Concord II

ASEAN, Vientiane Action Programme, 2004

Batam Joint Statement on the 4th Tripartite Ministerial Meeting of the Littoral States on the Straits of Malacca and Singapore

Cetak Biru Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (APSC Blueprint)

ICC- IMB Piracy and Armed Robbery Against Ships Report – Annual Report 2011

ICC- IMB Piracy and Armed Robbery Against Ships Report – First Quarter 2017

IMO Doc. MSC.4/Circ.152, Reports on Acts of *Piracy* and Armed Robbery against Ships—Annual Report 2009, March 29, 2010, at 2.

IMO Doc. MSC.4/Circ.164, Reports on Acts of *Piracy* and Armed Robbery against Ships, December 3, 2010, at 2.

IMO Doc. MSC.4/Circ.175, Reports on Acts of *Piracy* and Armed Robbery Against Ships Annual Report 2009, Agustus 2011

Konvensi Hukum Laut PBB 1982

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Agreement on Information Exchange and Establishment of Communication Procedures*
(Persetujuan tentang Pertukaran Informasi dan Pembentukan Prosedur Komunikasi)

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967.